



KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAMPIRAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL (KEM-PPKF)
TAHUN 2025

A. Target Makro

Indikator KEM	Target sesuai KEM-PPKF	Target sesuai KUA-PPAS
Laju pertumbuhan ekonomi	5,3%-5,6%	4,6%4.89%
Tingkat pengangguran terbuka	4,5%-5,0%	1,38%-1,56%
Rasio gini	0,379-0,382	0,263-0,270
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,56	0,56
Tingkat kemiskinan	7,0%-8,0%	5,07%-5,21%
Penurunan emisi GRK	0,386	0,44

Matriks KEM-PPKF Regional - Kab. Indragiri Hilir

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Penguatan Wellbeing (Stunting)	Penguatan Wellbeing (Kemiskinan)	Penguatan Wellbeing (Pelayanan Publik)	Percepatan Konvergensi Antardaerah
agiri Hilir	2025	2025	2025	2025	2025
Kinerja	%	%	%	%	%
Intervensi Pemda	A. 1). Peningkatan Porsi Mandatory spending infrastruktur dalam APBD 2). Peningkatan rasio rata rata belanja modal sekitar 1-4,5% 3). Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor	A. Peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif dengan melakukan refocusing dari belanja yang bersifat dukungan. Intervensi spesifik utama adalah pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin. Kemudian, intervensi sensitif dilakukan dengan peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan, gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses pangan bergizi.	A. APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas wellbeing Sumatera Utara dari aspek pendapatan, perumahan, lapangan kerja, akses pelayanan publik, dan pendidikan. Belanja fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan mandatory spending menjadi strategi utama.	A. Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.	A. Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antardaerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Terwujudnya Kawasan Strategis Kuala Tanjung

Intervensi TKD	A. 1). DAK Fisik (Infrastruktur 2). DAK NF (Pelayanan Publik: Pendidikan, Kesehatan 3). DAU Specific grant bidang Infrastruktur 4). Dana Desa 5). Insentif Fiskal	A. 1). DAK Fisik Kesehatan 2). DAK NF Kesehatan 3). Dandes 4). Hibah Air Minum	A. 1). BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan 2). DTU specific grant untuk meningkatkan kualitas pendidikan 3). DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan 4). DAK Non Fisik untuk meningkatkan skill SDM pekerja	A. 1). DAU specific grant untuk pelayanan publik 2). DAK Fisik 3). DAK Non Fisik	A. 1). DAK Fisik Konektivitas 2). DAU specific grant bidang infrastruktur 3). Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri 4). Insentif Fiskal
-------------------	--	--	---	--	--

Tembilahan, 10 Desember 2024

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir,



Feri Irawan, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19751015 199703 1 001